

**RESPON PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERATURAN  
KEPEMILIKAN SAHAM**

**TESIS**



**Oleh:**

**CHINDY ANNISA VIOLETA**

**2120532012**

**Dosen Pembimbing:**

**Dr. Rahmat Febrianto, S.E., M.Si, Ak, CA**

**PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**2023**

## ABSTRAK

### **RESPON PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERATURAN KEPEMILIKAN SAHAM**

Oleh: Chindy Annisa Violeta (2120532012)  
Magister Akuntansi, Universitas Andalas

Dosen Pembimbing:  
Dr. Rahmat Febrianto, S.E., M.Si, Ak, CA

*Penelitian ini menganalisis terkait upaya Pemerintah Daerah untuk memenuhi persyaratan kepemilikan saham di Bank Pembangunan Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, yang mengharuskan kepemilikan saham minimal 51% dimiliki oleh salah satu daerah. Masa penyesuaian yang diberikan adalah lima tahun sejak Permendagri No. 118 Tahun 2018 diundangkan. Pemerintah Daerah wajib melakukan penyesuaian kepemilikan sahamnya mulai dari tahun 2019-2023. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data kualitatif diperoleh melalui studi dokumentasi berupa laporan tahunan BPD dan APBD Pemerintah Daerah. Data diperoleh dari website resmi BPD masing-masing dan [djkg.kemenkeu.go.id](http://djkg.kemenkeu.go.id). Selanjutnya dilakukan wawancara semi terstruktur untuk pendalaman hasil penelitian. Wawancara dilakukan pada BPKAD Provinsi Sumatera Barat, BPKAD Kota Padang Panjang, dan Bank Nagari. Prosedur analisis data yang dilakukan dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Oleh karena itu, masih banyaknya kekurangan modal yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah agar bisa memenuhi syarat kepemilikan saham minimal 51% pada BPD hingga tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah belum dapat mengoptimalkan kepemilikan sahamnya pada BPD. Salah satu penyebabnya adalah karena Pemerintah Daerah belum memiliki kemampuan sumber pendanaan yang cukup untuk memenuhi kepemilikan sahamnya pada BPD hingga 2023. Pemerintah Daerah pada umumnya lebih memfokuskan pada prioritas utama. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu sudah berusaha secara bertahap dengan mengalokasikan anggaran penyertaan modal setiap tahunnya.*

**Kata Kunci:** *Kepemilikan Saham Daerah, Penyertaan Modal, Bank Pembangunan Daerah*



## ABSTRACT

### ***RESPON PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERATURAN KEPEMILIKAN SAHAM***

By: Chindy Annisa Violeta (2120532012)  
Magister of Accounting, Andalas University

Thesis Advisor

Dr. Rahmat Febrianto, S.E., M.Si, Ak, CA

*This study analysed the effort of the Local Government to comply the requirements of shareholding condition in Regional Development Bank as the Government Regulation Number 54, 2017. This regulation emphasized that shareholding should be owned by one of the regions in at least 51%. Adapting period for this regulation is five years since the promulgation of the Regulation of the Minister Home Affair or also known as Permendagri No. 118 of 2018. Local Government are required to adjust their shareholding starting from 2019-2023. The research methodology used in this study is a qualitative method. Qualitative data were obtained through a documentation study in the form of annual reports of Regional Development Bank and Regional Income and Expenditure Budget (APBD). Data were obtained from the official websites of each Regional Development Bank and [djkp.kemenkeu.go.id](http://djkp.kemenkeu.go.id). Furthermore, semi-structured interviews were conducted for a deep result of this study. Interview were conducted at the office of Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of West Sumatra Province, Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Padang Panjang City, and Nagari Bank. The analysis procedure done in this study as data reduction, data presentation, and conclusions. Therefore, there are still many capital deficiencies that need to be met by the Local Government in order to comply the minimum 51% shareholding requirement of the Regional Development Bank until 2023. This condition indicated that the Local Government has not been able to optimize there shareholding of the Regional Development Bank. One of the reasons is that the Local Government does not have sufficient funding sources yet to meet their shareholding of the Regional Development Bank until 2023. The Local Governments generally has their focus more on the main priorities. The efforts have been made by the Local Government is that they have tried in stages to allocate their capital investment budget annually.*

**Keywords:** *Regional Shareholding, Equity Participation, Regional Development Bank*